

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI INTELEJEN KEJAKSAAN DALAM PRAKTIK

A. Sejarah Kejaksaan Indonesia

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta⁴⁰.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang

⁴⁰ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)⁴¹.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara

⁴¹ Ibid, Hal.58

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman⁴².

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

⁴² Ibid, hal.58

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991⁴³.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut

⁴³ Ibid, hal.58

gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan⁴⁴.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

⁴⁴ *ibid*, hal.58

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu⁴⁵ :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁴⁵ Ibid, hal.58

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya⁴⁶.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya,

⁴⁶ Ibid, hal.58

upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- c. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- e. Manajemen sumber daya manusia
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum⁴⁷.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan

⁴⁷ Ibid, hal.58

menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat⁴⁸.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional

⁴⁸ Ibid, hal.58

Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan⁴⁹.

B. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Sofian Hadi, SH selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumedang⁵⁰

Nama/Kode : Sofian Hadi, S.H./ K.I

1. P : Pak dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, apakah jumlah tindak pidana Korupsi meningkat ?

K.I : ya, pada saat ini kasus tindak pidana Korupsi yang masuk dan diproses di tingkat Kejaksaan Sumedang, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

2. P : Mengapa bisa begitu pak, apakah karena implementasi perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi tidak berlaku dengan maksimal ?

K.I : Bukan begitu, karena pada saat ini justru dengan kultur yang semakin baik dan demi perwujudan good governance yang baik kita bersama-sama bertekad untuk memberantas tindak pidana korupsi walaupun terkadang susah untuk di lakukan

3. P : Pak menurut bapak bagaimana peranan intelejen Kejaksaan Sumedang dalam melakukan tugas nya mengungkap tindak pidana korupsi ?

⁴⁹ Ibid, hal.58

⁵⁰ Hasil wawancara dengan kasi intel kejaksaan negeri sumedang bapak Sofian Hadi S.H.

K.I : Pihak Kejaksaan Sumedang dengan bagian Intelijen nya sudah melakukan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

4. P : Kalau begitu bagaimanakah optimalisasi kinerja Intelejen Kejaksaan Sumedang dalam mengungkap tindak pidana korupsi ?

K.I : Dengan cara melakukan pengawasan tertutup dan operasi tangkap tangan secara cepat sehingga tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan cepat

5. P : Apakah cara tersebut efektif ?

K.I : Kalau menurut saya sih efektif, tetapi ya tentunya kita berharap dapat dioptimalkan lagi

6. P : Kalau begitu menurut bapak apakah perundang-undangan yang ada pada saat ini tidak bisa membuat jera bagi pelaku yang sudah pernah tertangkap ? sehingga mereka tidak merasa takut ?

K.I : Menurut perundang-undangan yang berlaku sanksi tindak pidana korupsi sebetulnya diatur dengan cukup tegas dan berat namun putusan yang didapat pelaku dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para koruptor yang tidak merasa jera

7. P : Apakah kendala-kendala yang dihadapi Intelejen Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya?

K.I : Kendala-kendala yang dihadapi saya kira, tindak pidana korupsi dilakukan oleh pihak-pihak elite yang tidak mudah untuk dibuktikan selain itu akses penangkapan terkadang sulit dilakukan karena adanya orang-

orang yang memback up, karena pada prinsipnya tindak pidana korupsi tidak dilakukan oleh satu orang saja, selain itu kondisi anggota dengan sumber daya yang sedikit lebih mempersulit pengungkapan tindak pidana korupsi

8. P : Apakah dengan begitu mengakibatkan semakin sulitnya pengungkapan tindak pidana korupsi?

K.I : Ya saya rasa begitu, karena tindak pidana korupsi biasanya terorganisir dengan rapi

9. P : Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Intelejen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?

K.I : Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan ialah lebih proaktif dan mendidik para anggota intel kami dalam melakukan tindakan intelejen sehingga dapat dengan cepat dan tanggap dalam menghadapi suatu kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi

10. P : Selain itu upaya yang dilakukan apa lagi pak ?

K.I : Yaitu dengan menanamkan jiwa keberanian terhadap para anggota intel dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi tanpa merasa takut terhadap pelaku yang hendak ditangkap dengan alasan mempunyai “backing” atau orang yang membela pelaku

11. P : Dengan cara bagaimana pak?

K.I : Kita melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan institusi dari pelaku, sehingga ketika proses penangkapan terjadi, kondisi dari proses

penangkapan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan sudah dilakukan persiapan sebelumnya

12. P : Bagaimana dengan kondisi fasilitas dan jumlah intel yang bapak pimpin?

K.I : Jumlah anggota yang kita milik memang terbatas karena hanya berjumlah 3 orang tentu ini menjadi suatu kesulitan bagi kami untuk mengungkap suatu tindak pidana.

13. P : Bagaimana Mengenai fasilitas kerja?

K.I : Itu pun menjadi hal yang krusial karena dalam proses intelejen di perlukan fasilitas yang sangat mendukung kinerja anggota kami

14. P : Bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut pak?

K.I : Kita berusaha untuk mengoptimalkan kondisi yang ada tanpa harus mengeluh dan terus bekerja keras dalam usaha mengungkap tindak pidana korupsi.

15. P : Terima kasih pak atas waktunya

K.I : Sama-sama

C. Fungsi Dan Tugas Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang⁵¹

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen itu berasal dari kata inteligensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.

Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap serta eksistensinya sangat diperlukan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan hidup manusia, dimana dewasa ini hampir semua negara memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri. Intelijen dewasa ini hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat.

Intelijen dalam pengertian yang lebih luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumedang, Sofian Hadi, S.H. Berdasarkan kepada PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER - 009/A/JA/01/2011

kegiatan yang terjabar dalam fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta ketiga intelijen sebagai produk.

Badan Intelijen sebagai organisasi yaitu dinas, badan atau satuan kerja yang secara fungsional atas dasar fungsi dan kompetensi yang dimiliki serta secara profesional atas dasar keahlian profesinya khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan intelijen, yang secara formal dilaksanakan oleh negara, pemerintah atau aparat hankam serta aparat penegak hukum dan dewasa ini kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalang dapat dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat, korporasi, swasta, LSM, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Untuk menjamin konsistensi dalam pelaksanaan dan agar dapat mencapai hasil kinerja yang optimal, intelijen sebagai organisasi ini idealnya mamiliki doktrin, tupoksi dan struktur organisasi, yaitu :

(a). Doktrin intelijen

Doktrin ini akan tergantung dari fungsinya, misalnya dalam fungsi penyelidikan doktrinnya antara lain adalah “kuasai isi perut lawan” agar kita mampu mengendalikan lawan, “kita kuat karena lawan lemah” untuk itu lemahkan kekuatan lawan, sedangkan dalam fungsi pengamanan doktrinnya antara lain adalah “sedia payung sebelum hujan”, ”amankan dirimu sebelum mengamankan orang lain” serta fungsi penggalangan doktrinnya antara lain adalah “tebarkan jaring seluas mungkin” agar memperoleh banyak ikan.

(b). Tupoksi intelijen

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi intelijen itu pada dasarnya adalah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang meliputi :

(1). Pengumpulan dan pengolahan data

Intelijen memiliki fungsi mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

(2). Analisis

Intelijen memiliki fungsi melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi.

(3). Antisipasi

Fungsi antisipasi ke depan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

(4). Deteksi dini

Fungsi mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini.

(5). Melacak

Fungsi menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup.

(6). Proteksi

Fungsi melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan atau sekuriti.

(7). Jejaring

Fungsi menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.

(8). Perkiraan

Fungsi membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang

(9). Kemampuan lain

Fungsi lainnya sesuai dengan tingkat inteligensia manusia atau terpulang pada kemampuan intelijen, kreasi dan inovasi

(c). Pendekatan Intelijen

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan yang cukup sulit dan rumit mengingat masalah yang dihadapi intelijen itu sangat kompleks dan penuh rahasia maka untuk itu intelijen perlu menyiapkan pendekatan dalam melakukan penyelidikan, yaitu atas dasar :

1). Analisis sasaran

Kemampuan merumuskan analisis sasaran atau ansas, yaitu sasaran atau obyek apa yang akan ditangani sehingga tepat sasaran.

2). Analisis tugas

Kemampuan merumuskan analisis tugas atau antug, yaitu kegiatan atau tugas apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan produktif atau adanya job deskripsi yang jelas sesuai dengan tanggung jawabnya.

3). Target operasi

Kemampuan merumuskan terget operasi atau TO sebagai tujuan.

(d). Struktur organisasi intelijen

Intelijen sebagai organisasi itu dapat dilihat sebagai kumpulan orang yang dibentuk dan disusun dalam suatu tata laksana untuk mencapai tujuan tersebut memiliki struktur organisasi yang hierarki, yang terbangun oleh unsur pimpinan / komando, unsur staf dan unsur pendukung. Dalam menyusun struktur organisasi intelijen itu sebaiknya mengacu pada prinsip “ramping struktur

Manusia dengan kemampuan intelijen, intelijensia atau daya nalarnya berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan dirinya agar

manusia mampu hidup ditengah-tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dewasa ini ini intelijen hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, bisnis, hukum dan memerlukan intelijen yang dapat digunakan sebagai pisau analisis masalah yang dihadapi. Intelijen tidak semata-mata milik negara, pemerintah, aparat pertahanan dan keamanan, aparat penegak hukum saja tetapi masyarakatpun dapat memiliki kemampuan intelijen untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, bahkan di negara-negara industri maju intelijen digunakan pula oleh orang perorangan atau korporasi.

Intelijen sebagai organisasi itu mengalami pasang surut, namun terus berkembang seiring dengan dinamikanya tata lingkungan yang selalu berubah dan intelijen sebagai organisasi itu adalah badan, dinas atau satuan kerja yang secara fungsional dan profesional khusus menangani masalah-masalah intelijen. Intelijen sebagai organisasi yang telah mantap adalah dinas intelijen militer, untuk itu dapat dijadikan data atau studi banding dengan dinas intelijen lain yang belum memiliki organisasi yang mapan. Intelijen sebagai organisasi itu seharusnya memiliki visi yang jelas dengan *inward looking* dan *outward looking*, memiliki misi yang transparan yaitu sebagai garda terdepan atau ujung tombak organisasi dan intelijen sebagai organisasi seharusnya memiliki pula tugas pokok yang jelas dengan *job deskripsi* yang rinci, yaitu dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi. Sedangkan struktur organisasi dinas intelijen itu tergantung dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok instansi, dimana struktur organisasi intelijen itu sebaiknya ramping struktur namun kaya fungsi, dengan

susunan organisasi yaitu adanya unsur pimpinan atau komando, adanya unsur pelaksana dan adanya unsur pendukung yang bersifat administratif.

Intelijen sebagai organisasi itu sebaiknya memiliki visi ke depan yang mampu mengantisipasi gejala-gejala kecenderungan yang kemungkinan akan terjadi, memiliki misi sebagai garda terdepan yang mampu mendeteksi dan mengatasi ancaman, gangguan, halangan dan tantangan, yang memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi serta memiliki doktrin

Intelijen sebagai produk ini adalah sebagai *output* dari hasil kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh organisasi, badan, dinas atau satuan kerja intelijen. Intelijen sebagai produk atau produk intelijen itu adalah karya tulis dibidang intelijen yang berisi gambaran hasil yang telah dicapai dalam menjabarkan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan disamping produk intelijen

yang tercermin dalam hasil yang dicapai dalam operasi intelijen. Produksi intelijen dan produk intelijen sebagai karya tulis intelijen atau tulisan intelijen ini merupakan produk penting dalam administrasi intelijen serta merupakan mata rantai yang dapat memperlancar pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana karya tulis atau tulisan intelijen ini dapat berupa tulisan, simbol atau grafis yang dibuat atau dikeluarkan oleh satuan kerja intelijen yang melaksanakan kegiatan intelijen.

Proses produksi dari suatu produk intelijen itu mencakup kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan dan mengolah data atas dasar suatu proses produksi,

dimana kata kunci dari proses produksi intelijen itu terletak pada kemampuan untuk melakukan analisis semua data *input* yang masuk. Proses analisis ini mencakup kegiatan memisah-misahkan, membagi-bagikan, menguraikan semua data komponen *input* yang masuk yang hasilnya akan mengandung penjelasan atau keterangan karena data input yang masuk itu sifatnya mentah serta belum dapat berbicara banyak dan baru setelah diolah, diproses dan dianalisis akan menghasilkan penjelasan atau keterangan

Data adalah fakta, kejadian atau peristiwa yang berhasil dikumpulkan oleh petugas intelijen itu bobotnya masih mentah dan belum dapat berbicara banyak serta untuk itu data tersebut perlu dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku yang antara lain melalui kajian penelitian atau telaahan staf yang akan menghasilkan informasi. Dengan demikian informasi itu adalah hasil atau output dari analisis data yang berisikan sejumlah keterangan.

Analisis ini dapat dilihat sebagai proses menyelidiki, membedah, membagi, menguraikan, memecah, memisah-misahkan, menerangkan bagian-bagian terkait dan proses analisis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan memegang peranan penting dalam proses produksi dan produk intelijen. Bertitik tolak dari pengertian intelijen sebagai suatu produk akhir dari proses analisis baket (bahan keterangan) menjadi informasi yang berisikan suatu estimasi tersebut, maka kegiatan intelijen pada dasarnya mencakup tiga komponen kegiatan sebagai suatu sistem yaitu kegiatan input data, kegiatan proses data dan kegiatan output data berupa informasi.

Kegiatan *input* data ini adalah upaya mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat fakta, data, bahan keterangan atau alat-alat bukti sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik sumber terbuka maupun sumber tertutup sebagai bahan masukan yang mana input data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian direkam dan disimpan dalam file intelijen secara permanen yang akan berfungsi sebagai *database* atau bank data.

Kegiatan proses data ini meliputi segala usaha dan aktivitas untuk menilai, menafsirkan, membandingkan, mengolah dan menganalisis semua data input tersebut yang mana outputnya adalah berupa informasi siap pakai. Kegiatan input data ini pada dasarnya tergantung pada kerajinan dan keuletan dari badan pengumpul (bapul), dimana bapul harus pro aktif terjun ke lapangan dengan pola jemput bola dan untuk mengumpulkan, mencatat data input yang masuk tersebut seharusnya setiap petugas bapul membawa sarana perekam, *tape recorder* dan *fototustel*. Catat dan rekam apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh bapul setiap data input dalam sarana perekam.

Kegiatan *output* data pada dasarnya terletak pada daya analisis kritis dari petugas analisis dimana kegiatan analisis data input inilah yang paling sulit dan paling menyita banyak pikiran. Terhadap informasi yang masuk atau siap pakai tersebut supaya disebarkan atau didistribusikan kepada user terkait untuk memungkinkan diadakannya perencanaan atau pengambilan tindakan yang telah diperhitungkan terlebih dahulu, dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas masalah yang sedang dihadapi